

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, konsep teori diperlukan sebagai landasan atau pijakan untuk mengemukakan permasalahan penelitian. Maka konsep teori dalam penulisan ini terlebih dahulu dijelaskan defenisi Ilmu Pemerintahan.

1. Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni (dalam Syafiee, 2005;20). Di katakan sebagai seni karena beberapa pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu menjalankan roda pemerintahan dengan karismatik. Sementara di katakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat di pelajari dan di ajarkan, memiliki objek, baik objek materi maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (Khas).

Menurut D.G.A. Van Poelje (dalam Syafie, 2005;21) Ilmu Pemerintahan yaitu mengajarkan bagaimana dinas umum di susun dan di pimpin dengan sebaik-baiknya. Sementara menurut H. A. Bras (dalam Syafie, 2005;21), ilmu pemerintahan dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itudi susun dan di fungsikan baik secara ke dalam maupun ke dalam warganya. Menurut R. Mac Iver (dalam Syafie, 2005;22), maksudnya pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Bagaimana manusia itu bisa di perintah. Jadi bagi Mac Iver, ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat di perintah.

Jika diadakan pendekatan dari segi bahasa terhadap kata “pemerintahan” atau “pemerintahan”, bahwa kedua kata tersebut berasal dari suku kata “perintah” yang berarti

sesuatu yang harus dilaksanakan. Menurut Surianingrat (1980;10) dalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi khas dari “perintah” yaitu :

1. Adanya “keharusan“ menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang di perintahkan;
2. Adanya dua pihak yaitu yang memberi dan yang menerima perintah;
3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dana yang menerima perintah
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Sementara itu defenisi lain dari ilmu pemerintahan dikemukakan oleh Ndraha (2003:7) yang mengatakan bahwa : ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa Publik dan layanan Sipil, dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Dan Ilmu Pemerintahan mempelajari pemerintah dari sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya, artiya dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan. Dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya, artinya pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha, 2003;7). Maka ruang lingkup Ilmu Pemerintahan menurut Ndrah (2003;7) yaitu:

1. Yang di perintah.
2. Tentukan yang di perintah (jasa publik dan layanan civil)
3. Pemerintah.
4. Kewenangan, Kewajiban dan Tanggung jawab pemerintah.
5. Hubungan Pemerintahan .
6. Pemerintah yang bagaimana yang di anggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan, kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
7. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu.
8. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan, kewajiban,dan memenuhi tanggung jawab.
9. Bagaimana supaya kinerja pemerintah sesuai dengan tuntutan yang di perintah dan perubahan zaman.

Sedangkan apabila dilihat dari defenisi pemerintahanya, maka Surianigrat (Bayu Suryaningrat,1992;2) berpendapat bahwa Pemerintahan adalah perbuatan atau cara/ urusan pemerintah, pemerintahn yang adil,dan pemerintahan yang berdemokrasi. Sedangkan pemerintah

adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan, atau dengan kata lain, pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan.

Dalam Ilmu Pemerintahan, pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan (Rasyid,1997;13) antar lain yaitu sebagai berikut :

- a. Menjamin Keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang syah melalui cara-cara kekuasaan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menajmin perubahan apratur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijaksanaan dan program oleh seluruh badan pemerintahan. Berabagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antar sektor dan antar lembaga. Menurut (Admosudirjo,2009;183), Manajemen Pemerintahan adalah manajmen yang merupakan lanjutan langsung dari pada pemerintahan atau tidak pemerintahan (*govermental*) yakni misalnya managmen daripada *government staff work*, manajmen kepolisian,

managemen dari pada *legal drafting* (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya).

Dan Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berabagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Dan menurut C.F Strong negara (dalam Syafie, 2005;22)

“Maksudnya pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan ke luar. Oleh karna itu, pertama, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keungan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan”.

2. Evaluasi

Evaluasi menurut Ndraha (2003;201) adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Terdapat berbagai model evaluasi, satu diantaranya menurut Ndraha (2003:201) adalah :

Model *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.

Sementara menurut Lubis (1985;167), dikatakan bahwa evaluasi mengenai pelaksanaan perencanaan tertentu, yang mana seringkali hal ini menyangkut suatu priode tahunan, tapi ada pula penyesuaian evaluasi di tengah-tengah waktu pelaksanaan jangka menengah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara Nomor Per/15/M.Pan/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, menyebutkan bahwa :

Evaluasi adalah suatu kegiatan menilai hasil suatu kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan”.

Menurut William N. Dunn dalam Nugraha (2004;186) kriteria dari evaluasi kebijakan publik mencakup :

1. Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan tercapai.
2. Efisiensi, beberapa usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok.
4. Kecukupan, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
5. Ketetapan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna.

Evaluasi dimaksudkan untuk melihat dan mengukur tindakan kinerja pelaksanaan suatu kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan. Serta digunakan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik dan sejauh mana tujuan tercapai.

Sedangkan Suchman dalam Anderson (dalam Arikunto dan Jabara, 2004:1) memandang bahwa evaluasi adalah sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan dalam PP No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadiln dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dijelaskan bahwa, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*infut*) keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari pelaksanaan rencana. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator masukan, indicator keluaran dan indicator hasil.

Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidaknya-tidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok yaitu :

- a. Mengukur kemajuan
- b. Menunjang penyusunan rencana

Memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali (Sudijono, 2005;8)". (Sumber : *Usulan Penelitian, Yulia Agusta, 2015*)

3. Teori Kebijakan

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dsb), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis, pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Menurut Thomas R. Dye (dalam Suharno, 2010;14), kebijakan publik sebagai berikut :

“Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan public, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan public, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik, penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan”.

Sementara definisi kebijakan public menurut Robert (Leo Agustino, 2008;6) mendefinisikan kebijakan public sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungan. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Hogwood dan Gunn yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. (dalam Suharto, 2007;4)

Menurut Anderson (Abidin, 2004;21), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku

atau sekelompok pelaku guna memecahkan. Suatu masalah tertentu. Sementara menurut Carl Friendrich (Leo Agustino, 2008;7), kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu.

Menurut Willian N.Dunn (2002: 86) model kebijaksanaan yang pantas diterapkan di era otonomi daerah adalah model normatik yang bertujuan tidak hanya menjelaskan dan atau mengamalkan beberapa keuntungan (nilai).

Untuk mewujudkan suatu kebijakan maka ada kriteria utama kebijakan menurut Dunn (dalam nogroho 2006 : 15) yaitu :

1. Efektifitas merupakan suatu tindakan yang telah dicapai apakah sudah sesuai dengan rencana.
2. Efisiensi merupakan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan sudah memuaskan kebutuhan
4. Kecukupan merupakan seberapa jauh rencana pencapaian hasil yang diinginkan tersebut dalam memecahkan masalah
5. Ketetapan yaitu apakah aspek hasil guna atau tujuan yang diinginkan benar berguna dan bernilai.

Dengan adanya kriteria dalam kebijakan menurut Dunn (dalam Nugroho 2006:155) maka diharapkan dapat berjalan dengan baik. Organisasi kebanyakan pemerintahan daerah atau berkreasi tidak dapat dipisahkan dari organisasi, maka dalam rangkan mendesain struktur organisasi menurut pandangan webber birokrasilah yang merupakan alat yang paling efisien dalam mendesain organisasi dalam mencapai tujuannya, dan birokrasi sangat di perlukan bagi organisasi besar dan komplek.

4. Pemerintah Daerah

Penyelenggaran pemerintah Negara Republik Indonesia meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dijalankan oleh persiden, seperti yang diatur dalam pasal 4

ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD". Dalam menjalankan pemerintahan, presiden di bantu oleh wakil presiden, menteri-menteri, dan kepala lembaga pemerintahan nondepartemen.

Pemerintah Daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas negara/pemerintah merupakan tugas-tugas ataupun urusan-urusan pemerintah diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Pada era otonomi setiap daerah harus berusaha menggali potensi yang milki oleh daerah. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah." (Sumber : *Usulan Penelitian, Yulia Agusta, 2015*)

5. Tugas

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seseorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah di buat berdasarkan tujun. Visi dan misi suatu organisasi. Setiap Pegawai atau THL seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan ke dalam satuan praktis dan kongkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait. Dalam peraturan perundang-undangpun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Menurut Moekijat (1998;11), Tugas adalah suatu bagian atau untuk suatu satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur elemen atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap. Sedangkan menurut Jhon dan Mary miner, Tugas adalah kegiatan

pekerjaan tertetuyang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Sementara defenisi tugas menurut Dale Yoder yaitu tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan (dalam Moekijat,1998;9) menurut Stone mengemukakan bahwa suatu jabatan merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (dalam Moekijat, 1998;10).

Di dalam departemen pemerintah maupun organisasi perangkat daerah, pembagian warna dan corak tugas tersebut di wadah dalam satuan-satuan kerja/tugas-tugas pokok diwadahi dalam satu unit satuan organisasi direktorat jendral. Dalam organisasi yang disebut dinas-dinas tugas pembantuan atau di wadah dalam satuan-satuan organisni yang disebut dinas-dinas tugas pembantuan atau diwadahi dalam satuan kerja secretariat jendral. Dalam suatu instansi atau organisasi, suatu uraian tugas yang jelas diharapkan semua orang akan memahami dan menerima peran yang diterima dan ditetapkan baginya, sehingga dapat dan mau melaksanakan tugasnya dengan baik.Seperti dikemukakan oleh Awaloedin (1984;40): “Salah satu yang harus dimiliki birokrasi yang sehat adalah kejelasan batas setiap wewenang dan tanggung jawab. Pokoknya apa yang bisa di sebut”job description”. Hal ini sangat penting,tidak saja dalam struktur birokrasi, tetapi terlebih pada tugas orang-orangnya. Jangan heran kalau meliahat banayak pegawai yang tidak pernah jelas.Namun jangan di kira membuat *job deskription* itu gampang,tetapi sangat sulit”

Oprasional ditangani oleh unsur staf, Padahal kegiatan tersebut seharusnya menjadi tugas dinas daerah sebagai unsur lini (Sadu,2003;27). Dalam upaya pembagian tugas terdapat hal-hal yang perlu di perhatikan yang menurut Sutarto (dalam Haslinda 2008;22) antara lain :

1. Tiap-tiap satuan organisasi hendaknya memiliki rincian aktifitas yang kemudian jelas termuat dalam sebuah deskripsi pekerjaan (*job Deskripsi*)
2. Tiap tiap pejabat dari puncak pimpinan sampai dengan pejabat yang berkedudukan rendah harus memilki deskripsi pekerjaan.
3. Jumlah tugas yang di bebankan kepada setiap pegawai sebaiknya berkisar 4-12 jenis. Sebab bila pegawai hanya menjalankan tugas saja, sesuatu saat akan merasa jemu.

4. Varian tugas diupayakan agar tetap saling berkaitan satu sama lain. Sebab bila pegawai melaksanakan tugas yang jauh berbeda dari dari fungsinya, maka tugas tersebut tidak dapat di laksanakan dengan baik.
5. Beban aktifitas bagi bagi tiap-tiap satuan organisasi atau sebab tugas pegawai, hendaknya merata sehingga dapat di hindarkan adanya tidak keseimbangan dalam menjalankan aktivitas kerjanya.
6. Penempatan pegawai hendaknya di lakukan dengan tepat. Tidak hanya penegetahuan dan keterampilan semata yang di jadikan acuan, akan tetapi jenis kelamin, kekuatan, umur, kesehatan, kejujuran, yang merupakan hal penting yang perlu di perhatikan.
7. Penambahan atau pengurangan pegawai hendaknya berdasarkan volume pekerjaan. Apabila jumlah tugas dalam suatu kelompok kerja banyak, maka di perlukan penambahan pegawai dalam kelompok tersebut, dan begitu sebaliknya.

6. Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsure pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahn Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota yang di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui sekretaris daerah. Dinas daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas wewenang desentralisasi. Pada Dinas daerah kabupaten/Kota dapat di bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten Kota dapat di bentuk unit pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten /Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/ Kota di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan

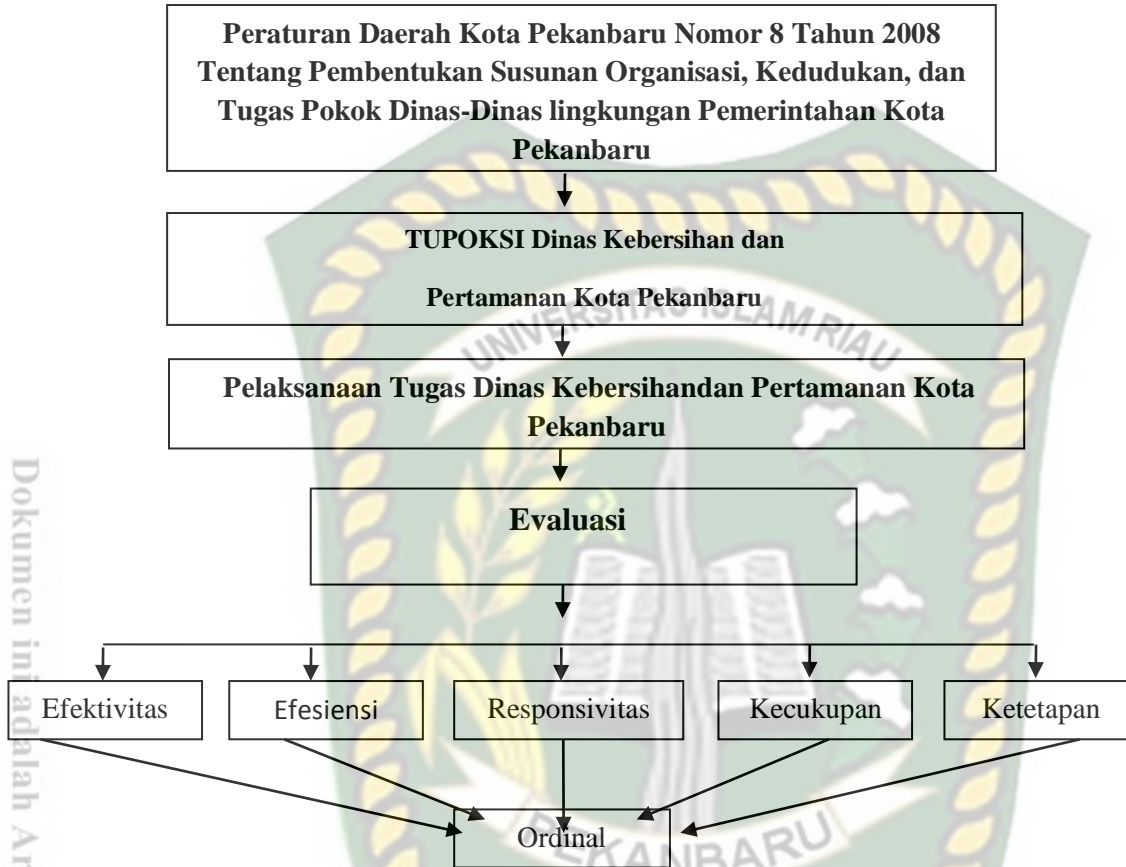
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara oprasional di koordinasikan oleh camat seperti yang tercantum pada peraturan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam Hamidi (2006;87) menurut PP Nomor 8 Tahun2003, menetapkan bahwa di pemerintah kabupaten/kota harus ada 14 kantor Dinas, dan di pemerintah provinsi ada 10 kantor Dinas. Pemebentukan dinas di lakukan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dalam lampiran PP Nomor 8 Tahun 2003.

Organisasi itu dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun1974 di sebut Dinas Daerah. Misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan, dan lain sebagainya (dalam Soejito, 1990;32). Menurut Soejito (1990;32), Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Daerah. Pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah di tetapkan dengan peraturan daerah, sesuai dengan pedoman yang di tetapkan oleh Menteri Dalam Negri. Peraturan Daearah itu untuk dapat berlaku melalui pengesahan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Jabatan-jabatan tertentu biasanya di kumpulkan dalam suatu organisasi yang menjalankan tugas Daerah dari suatu sektor tertentu dari kehidupan masyarakat.”

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Model kerangka pikir penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Sampah (Studi Pada Seksi Kebersihan Kota)



C. Konsep Oprasional

Konsep Oprasional yang dimaksud sebagai alat bantu untuk mempermudah dan memberikan batasan dalam pelaksanaan penelitian terhadap permasalahan yang di tentukan di lapangan agar tidak terjadi kesalahan persepsi, maka pengoprasional variable penelitian ini adalah :

1. Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses perbandingan antara Standar atau seharusnya (Das Sollen) dan Analisis hasilnya.

2. Kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok orang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan –hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
3. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah kota Pekanbaru yang pada hakekatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah dengan baik yang bersifat wajib maupun yang di pilihan.
4. Tugas adalah kegiatan yang di lakukan atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di rencanakan.
5. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang di miliki individu. Pelaku dan sifatnya di lakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya di motivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.
6. Perlengkapan dan Peralatan adalah alat atau bahan yang di gunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor, lapangan sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang di harapkan selesai lebih cepat, lebih tepat, dan lebih baik.
TUPOKSI adalah acuan pekerjaan yang tanggung jawab seseorang atau pekerjaan yang di bebaskan, sesuatu yang wajib di lakukan atau
7. Penanggulangan sampah adalah Penyapuan, Pengumpulan, Pengangkutan Sampah Pemerosesan Sampah atau Pemebuangan dari material sampah.
8. Evaluasi yaitu perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan

analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan. Adapun indicator yang digunakan adalah :

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok.
4. Kecukupan, seberapa jauh rencana pencapaian hasil yang diinginkan tersebut dalam memecahkan suatu masalah.
5. Ketetapan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna.

Evaluasi dimaksudkan untuk melihat dan mengukur tindakan kinerja pelaksanaan suatu kebijakan publik yang latar belakang dan alasan-alasan diambilnya suatu kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan. Serta digunakan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik dan sejauhmana tujuan yang dicapai.

Dilihat dari sudut pandang siklus kebijakan, evaluasi biasanya dianggap sebagai sebuah proses aktivitas yang berusaha menyoroti apa yang terjadi sesudah kebijakan publik tertentu diimplementasikan atau ditransformasikan dalam berbagai bentuk tindakan-tindakan rutin birokrasi. Saat yang tepat untuk mempertimbangkan perlunya melakukan evaluasi pada tahap penyeleksi opsi dan pada tahap mendesain program.

Bila dilihat dari fungsi, Menurut Dunn (2011;187) evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisi kebijakan, yaitu :

1. Evaluasi memberikan informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kenijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan terget telah tercapai.

2. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasikan dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan terget. Nilai diperjelaskan dengan mendefenisikan dan mengoprasikan tujuan dan terget.
3. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi, informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberikan sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Fungsi, evaluasi kebijakan sangat berguna untuk mendapatkan hasil atau informasi mengenai kinerja kebijakan. Dunn dalam Leo Agustino (2006;163-164) menyatakan ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan guna menghasilkan penilaian yang baik. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah :

Fungsi Evaluasi menurut Agustino (2006 ; 188-189), ada 3 macam yaitu :

1. Memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kebijakan.
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik-kritik terhadap nilai-nilai mendasari pemilihan tujuan dan terget.
3. Memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, perumusan masalah dan rekomendasi kebijakan.

Menurut Duun dalam Nugroho (2004; 536-537) evaluasi pada “perumusan” dilakukan pada sisi post-tindakan yaitu lebih pada “proses” perumasan dari pada muatan kebijakan yang biasanya “hanya” menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati. Secara umum, Dunn menggabarkan kriteria-kriteria indicator evaluasi kebijakan publik sebagai berikut :

Tabel II.1 Indikator Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn.

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan tercapai
Efisiensi	Seberapa jauh rencana pencapaian hasil yang diinginkan tersebut dalam memecahkan suatu
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok
Ketetapan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna
Kecukupan	Seberapa jauh rencana pencapaian hasil yang diinginkan tersebut dalam memecahkan suatu masalah

Sumber : Olahan Data 2016

Husen Kosasih dalam Sutopo dan Sugianto (2001;32-33) mengemukakan bahwa evaluasi bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan program kegiatan dimasa yang akan datang.

Menurut Beni Setiawan, (1999 ;20) dimensi utama utama evaluasi diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak, dari program. Pada prinsipnya yang perlu dibuat perangkat evaluasi yang dapat diukur melalui 4 dimensi yaitu :

- a. Indikator masukan (*input*)
- b. Proses (*prosess*)
- c. Keluaran (*Output*)
- d. Indikator dampak (*Outcome*)

D. Oprasional Variabel

Oprasional Variabel penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan Tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menanggulangi sampah. Adapun uraian-uraian dan penjabaran dapat kita lihat sebagai berikut ini.

Tabel I.3 : Konsep Oprasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru

No	Konsep	Variabel	Indikator	Dimensi (Subindikator)	Kategori Ukuran
1	Evaluasi dimaksudkan untuk melihat dan mengukur tindakan kinerja pelaksanaan suatu kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan. Serta digunakan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik dan sejauh mana tujuan tercapai. (William N.Dunn, 2011:68)	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru	1.Efektifitas	a. Cara Mengatur THL b. Mengawasi Tugas THL c. Memberikan Perhatian Terhadap THL	Ordinal
2	Tugas adalah merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seseorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah di buat berdasarkan tujuan.		2.Efisiensi	b. Mengawasi Tugas THL	Ordinal
			3. Responsivitas	c. Memeberikan Perhatian terhadap THL	Ordinal
				a. Cara mengatur THL	
			4. Kecukupan	b. Mengawasi Tugas THL c. Memeberikan Perhatian terhadap THL	Ordinal
5. Ketetapan	a. Cara mngatur THL b. Mengawasi Tugas THL c. Memberikan Perhatian terhadap THL d. Cara Mengatur THL e. Mengawasi THL f. Memberikan Perhatian terhadap THL	Ordinal			

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru

E. Teknik Pengukuran

Dalam rangka menjawab tujuan penelitian ini, maka perlu di tetapkan pengukuran untuk variabel maupun indikator variabel. Untuk indikator variabel dalam penelitian ini di klarifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik. Untuk menganalisis data, uraian dari masing-masing pengukuran variable dapat di lihat sebagai berikut.

Berdasarkan konsep Oprasional di atas, maka indicator-indikator yang terdapat dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dikategorikan:

Baik : Jika semua indikator berada pada kategori baik pada persentase 67-100 %

Cukup Baik : Jika sebagian besar atau 2 dari 3 indikator variabel berada pada persentase 34-66 %

Tidak Baik : Apabila suatu atau tidak sama sekali dari kriteria penilaian yang di laksanakan dan atau hasil dari rekapitulasi jawaban reponden di bawah 0-33 %

Adapun ukuran masing-masing Indikator Variabel Sebagai berikut :

1. Efektifitas

Baik : Apabila ke 3 item penilaian terlaksana atau tanggapan responden berada pada score 67-100 %

Cukup Baik : Apabila 2 dari 3 item penilaian dapat di laksanakan atau tanggapan responden berada pada score 34-66 %

Tidak Baik : Apabila satu atau tidak satupun dari item penilaian dapat di laksanakan atau jawaban responden score 0-33 %

2. Efisiensi

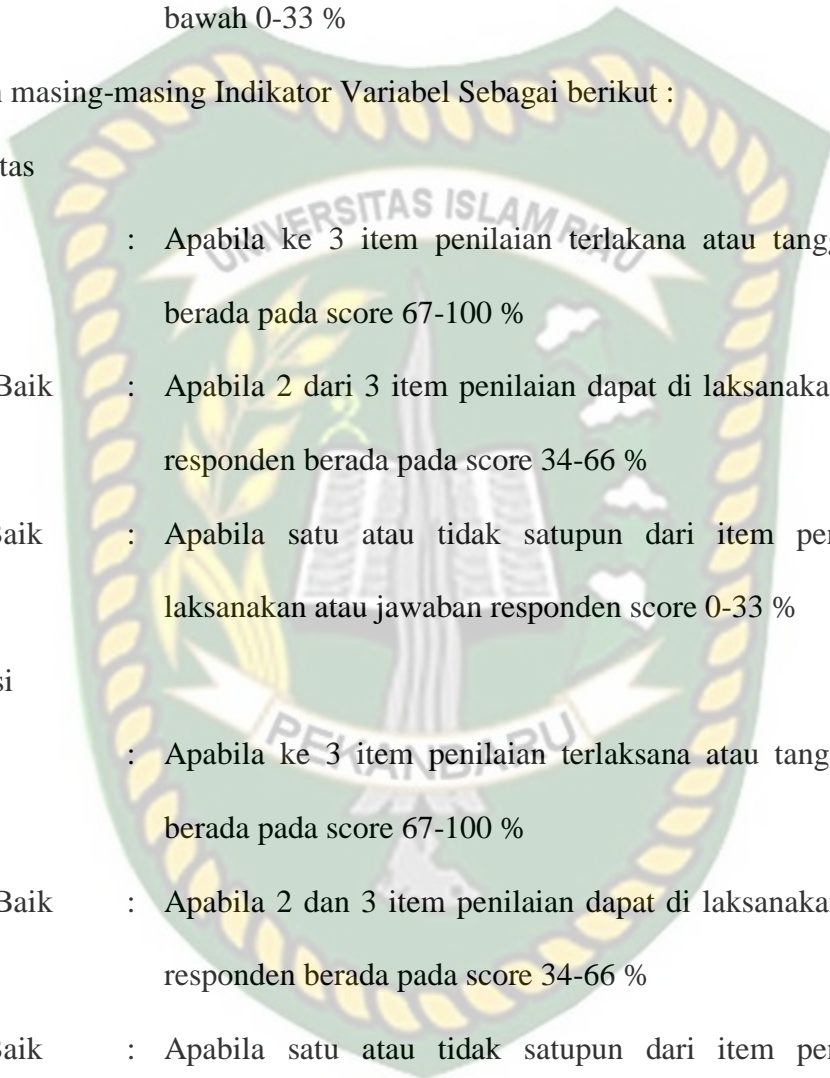
Baik : Apabila ke 3 item penilaian terlaksana atau tanggapan responden berada pada score 67-100 %

Cukup Baik : Apabila 2 dan 3 item penilaian dapat di laksanakan atau tanggapan responden berada pada score 34-66 %

Tidak Baik : Apabila satu atau tidak satupun dari item penilaian dapat di laksanakan atau jawaban responden berada pada score 0-33 %

3. Responsivitas

Baik : Apabila ke 3 ite penilaian terlaksana atau tanggapan responden berada pada score 67-100 %



Cukup Baik : Apabila 2 dari 3 item penilaian dapat dilaksanakan atau tanggapan responden berada pada score 34-66 %

Tidak Baik : Apabila satu atau tidak satupun dari item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada score 0-33 %

4. Kecakupan

Baik : Apabila ke 3 item penilaian terlaksana atau tanggapan responden berada pada score 67-100 %

Cukup Baik : Apabila 2 atau 3 item penilaian dapat dilaksanakan atau tanggapan responden berada pada score 34-66 %

Tidak Baik : Apabila 1 atau 3 item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada score 0-33 %

5. Ketetapan

Baik : Apabila ke 3 item penilaian terlaksana atau tanggapan responden berada pada score 67-100 %

Cukup Baik : Apabila 2 atau 3 item penilaian dapat dilaksanakan atau tanggapan responden berada pada score 34-66 %

Tidak baik : Apabila satu atau tidak satupun dari item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada score 0-33 %



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau